BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Walhi-pertemuan
Edisi : 18 APRIL 2008
Hari : JUMAT
Hal. : 14

PNLH X
Butuh Pemimpin Pro- lingkungan

Bantul, Kompas - Pergantian rezim penguasa dari Orde Baru ke orde reformasi ternyata tidak mengubah pola dan paradigma pembangunan yang dipakai. Pembangunan masih bersandar pada kebijakan neoliberal, yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar yang menjadi pembuka Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X di Taman Seni Gabusan Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (17/4). Hadir selaku pembicara, Rizal Ramli (Ketua Komite Bangkit Indonesia), Edy Suandi Hamid (Rektor Universitas Islam Indonesia), Emi Hafild (mantan Ketua Walhi), dan Khalid Muhamad (Ketua Walhi).

Menurut Rizal, kepemimpinan bangsa saat ini lebih banyak mengorbankan lingkungan untuk kepentingan segelintir orang saja. Ia mencontohkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengaturan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

”Peraturan itu jelas memberikan keistimewaan bagi pengusaha tambang karena mereka bisa memanfaatkan kawasan hutan lindung. Kebijakan ala neoliberalisme seperti inilah yang membuat lingkungan semakin rusak,” katanya.

Edy Suandi Hamid mengatakan, kepemimpinan nasional yang dibutuhkan saat ini adalah mereka yang tidak saja mampu berbicara, tetapi juga berani beraksi melawan neoliberalisme.

Emi Hafild mengatakan, sudah cukup banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. ”Butuh kepemimpinan dan ideologi yang lebih jelas agar terjadi perubahan mendasar,” kata Emi Hafild. (ENY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup